

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan berbagai negara termasuk negara berkembang untuk mendapatkan perubahan dalam aspek kehidupan manusia. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat (Farhan & Sugianto, 2022). Keberhasilan suatu pembangunan dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, serta semakin rendahnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat di suatu daerah (Febriyani & Anis, 2021). Distribusi pendapatan adalah suatu indikator penting dalam perkembangan perekonomian daerah. Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan dan distribusi kesejahteraan ekonomi.

Ketimpangan pendapatan adalah distribusi pendapatan total yang tidak seimbang antara rumah tangga dalam suatu negara, dimana ketimpangan yang tinggi membuktikan distribusi pendapatan yang tidak seimbang di masyarakat (Rohani, 2021). Tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah adanya kesenjangan ekonomi, yaitu perbedaan pendapatan yang cukup besar antara masyarakat dengan penghasilan tinggi dan mereka yang berpenghasilan rendah (Fattah, 2022). Berdasarkan *Asian Development Bank* dalam Huang (2019), ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan adanya konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan ini mencerminkan distribusi pendapatan yang belum merata, yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan memperlambat upaya pembangunan yang inklusif di berbagai sektor.

Menurut laman *Consumer News and Business Channel* (CNBC), yang dipublikasikan pada tanggal 1 Agustus 2024, data Survei Sosial Ekonomi Nasional mengkonfirmasi terjadinya perbedaan pertumbuhan pendapatan di masyarakat yang membuat kelas kaya semakin kaya dan kelas menengah jatuh

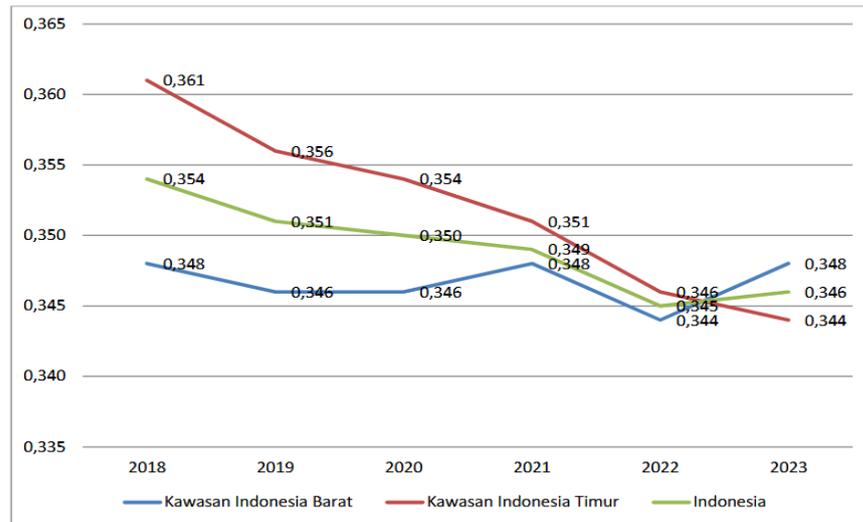
miskin. Fenomena ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Indonesia masih belum merata sehingga menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Kondisi tersebut juga menunjukkan pentingnya kebijakan yang mampu mengurangi disparitas agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keberagaman geografis, sosial, dan ekonomi di Indonesia menciptakan ketimpangan antarwilayah, terutama antara Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT) (Leasiwal *et al*, 2022). Ketimpangan ini telah menjadi perhatian nasional karena berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia tersebar di berbagai tempat tinggal, seperti di desa dan kota, tentu mempunyai tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda (Juniati *et al*, 2022). Kawasan Timur Indonesia masih menjadi perhatian utama pemerintah karena wilayah ini belum menunjukkan perkembangan yang setara dengan Kawasan Barat Indonesia.

Kondisi perekonomian di Kawasan Barat Indonesia cenderung lebih maju dan stabil dibandingkan Kawasan Timur Indonesia. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi pusat-pusat ekonomi, industri, dan infrastruktur yang lebih berkembang di wilayah barat, termasuk adanya kota-kota besar seperti Jakarta yang menjadi motor penggerak perekonomian nasional (Dewanto & Rahmawati, 2021). Kawasan Indonesia Timur masih menghadapi tantangan pembangunan dan permasalahan ekonomi, seperti akses infrastruktur yang terbatas, distribusi pendapatan yang belum merata, dan ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan (Sihombing, 2019).

Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan menggambarkan konsentrasi kepemilikan aset dan kendali atas aktivitas ekonomi pada kelompok tertentu, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak negatif, khususnya terhadap stabilitas sosial, politik, dan keamanan (Suryani & Woyanti, 2021). Oleh karena itu, upaya untuk menurunkan ketimpangan pendapatan menjadi salah satu tujuan utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Indonesia memiliki standar dalam mengukur ketimpangan pendapatan yang pada umumnya dapat diukur dengan menggunakan indeks gini/ gini rasio (Badan Pusat Statistik, 2023). Ketimpangan pendapatan dapat diukur menggunakan indikator gini ratio

yang memiliki rentang nilai antara nol hingga satu. Angka gini ratio yang mendekati nol menunjukkan bahwa pendapatan didistribusikan secara merata di antara seluruh penduduk. Berikut ini adalah gambar data gini rasio untuk Kawasan Indonesia Barat, Kawasan Indonesia Timur, dan Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2022).



Sumber: BPS Indonesia

Gambar 1.1
Gini Rasio Kawasan Indonesia Barat, Kawasan Indonesia Timur, dan Indonesia dari tahun 2018 – 2023

Berdasarkan gambar 1.1 pada tahun 2018 hingga 2023, dapat dilihat bahwa terjadi pola penurunan angka gini rasio di Indonesia sebesar 0,354 pada tahun 2018 menjadi 0,345 pada tahun 2022, dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 0,346. Apabila melihat ketimpangan pendapatan menurut kawasan terdapat perbedaan antara Kawasan Indonesia Timur dan Kawasan Indonesia Barat. Pada Kawasan Indonesia Barat tercatat sebesar 0,348 lebih rendah dibandingkan Indonesia secara nasional, sedangkan di kawasan Indonesia Timur mencapai 0,361 lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Pada tahun 2019, kawasan barat mengalami sedikit penurunan menjadi 0,346, sementara kawasan timur menurun lebih signifikan menjadi 0,356. Tren penurunan ini terus berlanjut pada tahun 2020, di mana kawasan barat stabil di angka 0,346 dan kawasan timur menurun lagi menjadi 0,354. Pada tahun 2021, kawasan barat mengalami

kenaikan ke angka 0,348, sedangkan kawasan timur menurun lebih cepat menjadi 0,351. Hingga tahun 2022, kawasan Indonesia Barat dan Kawasan Indonesia Timur mengalami penurunan dengan angka 0,344 dan 0,346. Angka gini rasio pada tahun 2023 menunjukkan Kawasan Indonesia Barat mengalami kenaikan menjadi 0,348 dan pada Kawasan Indonesia Timur mengalami penurunan menjadi 0,344.

Kawasan Indonesia Timur pada grafik merupakan wilayah dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi dibandingkan dengan Kawasan Indonesia Barat dan Nasional, akan tetapi angka gini rasio tersebut lebih rendah dibandingkan Kawasan Indonesia Barat dan Nasional pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan timur menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengatasi ketimpangan, tetapi juga berhasil membuat kemajuan yang signifikan. Kawasan Timur Indonesia selama ini dianggap sebagai wilayah yang terbelakang dilihat dari pembangunan ekonomi karena pembangunan ekonomi selama ini lebih berorientasi pada Jawa dan beberapa wilayah di Kawasan Indonesia Barat (KIB) (Kay, 2022). Pentingnya penelitian pada kawasan ini terletak pada pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan ketimpangan dan efektivitas kebijakan di setiap kawasan. Penelitian seperti itu dapat memberikan wawasan tentang bagaimana program dan strategi pembangunan dapat lebih disesuaikan untuk mendukung pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Julihanza & Khoirudin, 2023). Besarnya angka PDRB maka akan meningkatkan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, dimana hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat biasanya diikuti oleh pendapatan yang lebih tinggi dan distribusi pendapatan yang lebih merata di seluruh daerah (Yuliani *et al*, 2021). Proses laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat melalui tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) dan suatu daerah dapat dilihat melalui tingkat pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana tingkat perkembangan PDB tersebut menjadi ukuran kesuksesan suatu negara dalam menciptakan pembangunan ekonomi. Kawasan Indonesia Barat umumnya

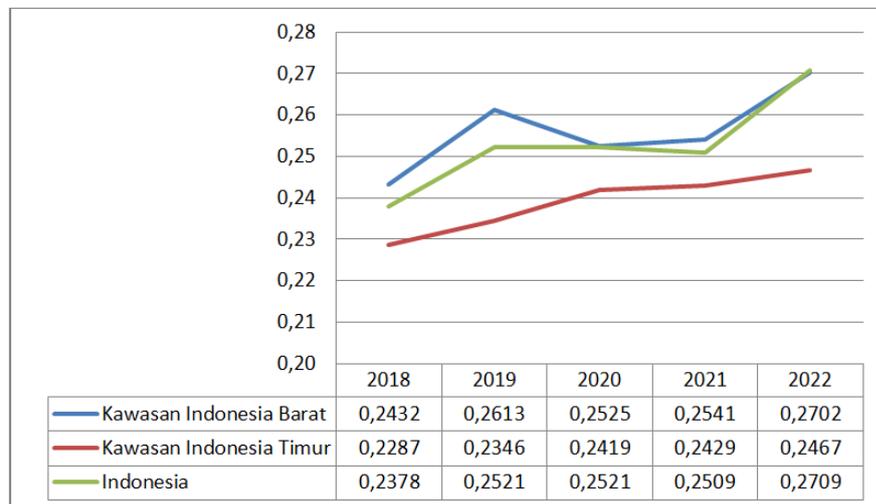
memiliki PDRB yang lebih tinggi dibandingkan kawasan Indonesia Timur (BPS). Sebagai contoh, DKI Jakarta mencatat PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp 1.953.488,99 (milyar rupiah). Pada tahun 2022, yang umumnya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, didukung oleh infrastruktur yang lebih baik dan kontribusi sektor industri serta jasa yang signifikan.

Julihanza & Khoirudin (2023) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat belum tentu mencerminkan keberhasilan pembangunan secara menyeluruh, karena pertumbuhan tersebut kadang justru berkontribusi pada ketimpangan dan distribusi pendapatan yang tidak merata, sehingga pemerataan tidak selalu terjamin. Banna *et al.* (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa ketimpangan pendapatan antar kelompok etnis telah menyempit, pertumbuhan ekonomi secara signifikan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pendapatan. Dimana jika dilihat dari dua studi terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga penting untuk dianalisis lebih lanjut bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

Pengembangan sektor keuangan, khususnya sektor perbankan, berperan penting dalam memperluas akses dan penggunaan layanan perbankan oleh masyarakat. Semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan keuangan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penghasilan, salah satunya melalui fasilitas kredit dari lembaga keuangan yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif, seperti usaha atau investasi (Duygulu *et al.*, 2022). Menurut Bank Indonesia (2022), lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting sebagai perantara dalam sistem keuangan, terutama dalam upaya mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Inklusi keuangan adalah suatu proses untuk membawa individu dalam perekonomian ke dalam sistem keuangan untuk memanfaatkan peluang, dimana produk dan layanan keuangan akan tersedia lebih luas dan masyarakat dengan pendapatan rendah akan mampu menemukan pendanaan dari sektor keuangan tersebut (Dogan & Guller, 2021). Menurut Sarma (2012), indeks inklusi keuangan dihitung berdasarkan tiga aspek utama, yaitu akses atau jangkauan,

ketersediaan layanan, dan pemanfaatannya. Ketiga dimensi tersebut diyakini mampu mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat terlibat dalam sistem keuangan secara menyeluruh.



Sumber : Bank Indonesia & OJK , 2025

Gambar 1.2
Indeks Inklusi Keuangan 2018 – 2022

Berdasarkan gambar 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa indeks inklusi keuangan di Kawasan Indonesia Barat (KIB) secara konsisten lebih tinggi dibandingkan Kawasan Indonesia Timur (KIT) maupun rata-rata nasional selama periode 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, indeks inklusi keuangan KIB berada di angka 0,2432, sementara KIT hanya sebesar 0,2287 dan nasional sebesar 0,2378. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2022, dengan indeks KIB mencapai 0,2702 dan KIT 0,2467, sementara nasional berada di angka 0,2709. Kenaikan di seluruh kawasan menunjukkan adanya kemajuan inklusi keuangan, meskipun masih terdapat kesenjangan antarwilayah.

Jika dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan nasional, terlihat bahwa tren pertumbuhan secara keseluruhan mengikuti pola yang mirip dengan KIB. Indeks nasional meningkat dari 0,2378 pada tahun 2018 menjadi 0,2709 pada tahun 2022, dengan pola pertumbuhan yang hampir sejajar dengan KIB. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan inklusi keuangan secara nasional lebih dipengaruhi oleh kawasan barat dibandingkan timur. Meskipun begitu,

peningkatan yang terjadi di kedua kawasan tetap berkontribusi dalam memperluas akses keuangan di Indonesia, meskipun dengan kecepatan yang berbeda.

Studi yang membahas pengaruh inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan dilakukan oleh Erlando *et al* (2020) menunjukkan bahwa Inklusi keuangan berhubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan yang akan berujung pada meluasnya ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur Indonesia. Hal ini terjadi pada pengaruh dimensi ketiga (*usability*) terhadap ketimpangan pendapatan, meskipun inklusi keuangan meningkat, apabila distribusi kredit dan simpanan hanya terkonsentrasi pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi maka akan meningkatkan kesenjangan pendapatan. Penelitian lainnya oleh Calis & Gokceli (2022) hasil temuannya menjelaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Peningkatan akses terhadap layanan keuangan seperti bertambahnya jumlah rekening bank dan ATM dapat memberikan manfaat nyata bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dengan membuka peluang memperoleh tambahan penghasilan melalui aktivitas menabung maupun pemanfaatan kredit.

Pengangguran yang tinggi cenderung meningkatkan ketimpangan karena kelompok yang menganggur tidak memiliki pendapatan yang memadai (Esquivias *et al*, 2021). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik. A (2022), Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Indonesia Barat menunjukkan penurunan dari tahun 2018 sebesar 5,12% menjadi 5,02% di tahun 2019, dan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2020 menjadi 6,84%, yang mengganggu aktivitas ekonomi. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka menurun secara bertahap menjadi 6,23% pada 2021 dan 5,69% pada 2022. Tingkat pengangguran terbuka di Kawasan Indonesia Barat lebih tinggi dibandingkan kawasan Indonesia Timur sepanjang periode 2018 hingga 2022. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan jumlah penduduk, struktur industri, dan tingkat urbanisasi, di mana kawasan barat lebih bergantung pada sektor formal yang lebih terdampak oleh fluktuasi ekonomi.

Agustin *et al* (2024) menemukan bahwa pengangguran berperan dalam memperlebar ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia, karena individu yang tidak bekerja lebih rentan mengalami tekanan ekonomi serta kehilangan keterampilan dan peluang karier. Sebaliknya, Ashari *et al* (2024) menunjukkan bahwa pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, mengingat struktur ekonomi nasional yang terpecah antara sektor formal–informal serta perbedaan wilayah perkotaan dan pedesaan. Penelitian Ersad *et al* (2022) mengungkapkan bahwa pengangguran justru memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan, karena mayoritas tenaga kerja berada di sektor informal dengan pendapatan rendah.

Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dan berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan keberhasilan pembangunan nasional karena pendidikan menunjukkan manfaat umum dari kinerja populasi suatu negara (Purba *et al*, 2024). Ukuran dalam indikator pendidikan dapat menggunakan rata-rata lama sekolah, dimana semakin tinggi kualitas pendidikan seseorang maka kesenjangan pendapatan akan semakin menurun (Purba *et al*, 2024). Rata-rata lama sekolah mengindikasikan jumlah tahun pendidikan formal yang ditempuh oleh individu dalam kelompok usia tertentu (BPS, 2020). Pada kawasan Indonesia Barat, rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,64 tahun pada 2018 menjadi 9,09 tahun pada 2022. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan keberlanjutan pendidikan di wilayah barat. Di kawasan Indonesia Timur, rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan, dari 8,05 tahun pada 2018 menjadi 8,55 tahun pada 2022.

Perbedaan rata-rata lama sekolah di Kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur ini mencerminkan kesenjangan dalam akses pendidikan antara kedua wilayah, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan infrastruktur, distribusi sekolah, dan tingkat literasi masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan akses dan upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Capaian ini mendekatkan Indonesia pada salah satu indikator Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu memastikan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua, yaitu 12 tahun belajar. Upaya lebih besar

diperlukan di kawasan Indonesia Timur untuk mendekati capaian rata-rata lama sekolah ke tingkat yang setara dengan kawasan Indonesia Barat.

Penjelasan pada uraian di atas menunjukkan bahwa hubungan antara ketimpangan pendapatan dan indikator-indikator makroekonomi seperti inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan pendidikan masih memerlukan analisis yang lebih mendalam, mengingat disparitas distribusi pendapatan masih terjadi secara nyata antara Kawasan Indonesia Timur dan Kawasan Indonesia Barat. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana pengaruh masing-masing indikator tersebut terhadap tingkat ketimpangan di kedua kawasan dan pada nasional. Dalam menganalisis hubungan tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis data panel, karena data panel memungkinkan untuk menggabungkan informasi lintas waktu (*time series*) dan antar unit wilayah (*cross section*), sehingga mampu menangkap dinamika perubahan serta heterogenitas antar daerah secara lebih akurat. Dengan demikian, penggunaan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan valid mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Kawasan Indonesia Barat, Timur, dan Nasional. Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih kontekstual, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing kawasan, sehingga mampu mengurangi disparitas regional dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian mengenai ketimpangan pendapatan masih sangat penting bagi pemerintah daerah karena isu ini tetap menjadi tantangan utama dalam pembangunan wilayah, terutama mengingat masih adanya kesenjangan pendapatan antarwilayah, khususnya antara Kawasan Indonesia Barat dan Kawasan Indonesia Timur. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional yang merata. Meskipun beberapa indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan distribusi kesejahteraan yang merata di seluruh kawasan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata berpotensi memperlebar kesenjangan pendapatan apabila hasil pembangunan hanya terpusat di wilayah tertentu dan tidak dirasakan secara proporsional oleh seluruh kelompok masyarakat. Tingkat pengangguran yang masih tinggi, terutama di kawasan yang terpinggirkan, menjadi faktor yang dapat memperburuk ketimpangan karena rendahnya akses terhadap pekerjaan produktif. Pendidikan sebagai pilar penting pembangunan sumber daya manusia memiliki potensi besar dalam menciptakan kesetaraan peluang ekonomi, namun disparitas dalam akses dan kualitas pendidikan antarwilayah masih menjadi hambatan serius. Begitu pula dengan inklusi keuangan, yang idealnya mampu mendorong partisipasi ekonomi masyarakat secara lebih luas, akan tetapi masih belum optimal di banyak daerah, terutama di Indonesia Timur. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian empiris yang menelaah bagaimana variabel-variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, pengangguran, dan pendidikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di masing-masing kawasan. Penelitian ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adil, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing kawasan.

Peneliti menilai pentingnya mengkaji isu tersebut secara mendalam, sehingga dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Indonesia Barat, Kawasan Indonesia Timur, dan Nasional?
2. Bagaimana pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Indonesia Barat, Kawasan Indonesia Timur, dan Nasional?
3. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Indonesia Barat, Kawasan Indonesia Timur, dan Nasional?
4. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Indonesia Barat, Kawasan Indonesia Timur dan Nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Indonesia Barat, Kawasan Indonesia Timur, dan Nasional.
2. Untuk menganalisis pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Indonesia Barat, Kawasan Indonesia Timur, dan Nasional.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Indonesia Barat, Kawasan Indonesia Timur, dan Nasional.
4. Untuk menganalisis pengaruh Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Indonesia Barat, Kawasan Indonesia Timur, dan Nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis terkait penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi praktisi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi akademisi maupun praktisi yang memiliki minat terhadap isu pembangunan

ekonomi, kesenjangan pendapatan, dan kebijakan fiskal daerah. Temuan dan analisis yang disajikan dalam penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah yang membahas disparitas ekonomi antarwilayah, khususnya dalam konteks Indonesia Barat dan Timur. Dengan demikian, penelitian ini dapat membuka peluang bagi kajian lanjutan dengan pendekatan atau variabel yang lebih luas.

2. Manfaat bagi pemerintah

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan tepat sasaran. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan adanya informasi yang berbasis data empiris, diharapkan kebijakan yang diambil ke depan dapat disesuaikan agar lebih responsif dan efektif dalam menciptakan keseimbangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan pada proposal tesis ini dibagi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum isi tiap bab.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab II menyajikan landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bab ini juga mencakup tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema untuk memperkuat argumen ilmiah, serta menjelaskan

kerangka pemikiran yang menjadi dasar logis hubungan antar variabel yang diteliti dan rumusan hipotesis yang akan diuji.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan dan menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, definisi operasional masing-masing variabel, serta metode analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab IV menyajikan temuan-temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data. Bab ini juga membahas interpretasi hasil penelitian dengan mengaitkan pada teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

BAB V : PENUTUP

Bab V kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta implikasi kebijakan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Bab ini menjadi penutup yang merangkum inti dari keseluruhan penelitian.

